



**Judul** : Kinerja Kudu Semakin Baik  
**Tanggal** : Minggu, 21 Mei 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Gaji PNS Naik Kinerja Kudu Semakin Baik

ANGGOTA Komisi II DPR Guspardy Gaus menyambut positif usulan kenaikan gaji yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Diketahui, usulan itu disampaikan Anas dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/5).

Guspardi bilang, kenaikan gaji terakhir diterima para abdi negara tersebut pada 2019. Artinya, sudah empat tahun berturut-turut PNS tidak merasakan kenaikan gaji lagi. Inflasi dan kenaikan harga barang di lapangan membuat kenaikan gaji tersebut layak diberikan.

"MenPAN-RB pasti juga sudah melakukan kajian mengenai kesejahteraan para PNS yang ditinjau dari berbagai aspek," ujar Politisi PAN itu.

Guspardi menambahkan, soal berapa persen kenaikan gaji PNS yang diusulkan, tentu diperlukan kajian. Yang jelas, jika kenaikan gaji PNS itu diimplementasikan, jabatan paling rendah hingga paling tinggi disamaratakan.

"Jangan sampai yang menikmati itu pejabat-pejabat yang lebih tinggi jabatannya," tutur dia.

Selain itu, pemerintah diminta memastikan agar kenaikan gaji tersebut nanti dibarengi kinerja PNS yang makin baik. Tidak ada lagi mental ingin dilayani, tindakan pungli, *mark-up* anggaran, hingga upaya memperlambat birokrasi.

"Sistem *punishment* dan *reward* harus tegas dan jelas. Itu harus dijawab oleh ASN ketika kenaikan gaji diberikan," tegasnya.

Guspardi pun meminta masyarakat tidak mengaitkan usul tersebut dengan pemilu yang sebentar lagi berlangsung.

Dia meyakini, MenPAN-RB tidak ujug-ujug mengajukan usul tersebut. Selain itu, keputusan tersebut pun masih harus digodok oleh Kemenkeu untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Sementara, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyoroti rencana pemerintah yang ingin merombak rumusan dan pemberian tunjangan kinerja (*tukin*) bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah harusnya lebih memprioritaskan kenaikan gaji PNS terlebih dahulu dibandingkan kenaikan *tukin*.

Mardani menilai, hal itu agar ada kesetaraan dan meminimalisasi ketimpangan. Jika gaji PNS sudah naik dan menyejahterakan, maka *tukin* bisa disesuaikan berdasarkan kinerja mereka masing-masing, bukan per institusi seperti selama ini.

Lebih lanjut, andai pun terjadi perombakan skema *tukin* di tingkat pusat dan daerah, maka harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sebab, ini berkaitan dengan kesejahteraan para aparatur negara serta dorongan kinerja pelayanan publik mereka.

"Misal minimal semua ASN gaji awal Rp 10 juta, baru tunjangan kinerja diatur dengan seksama," kata dia.

Politisi Fraksi PKS ini mengatakan, gaji ini penting dinaikkan supaya pendapatan PNS tak lagi diakali dengan tunjangan yang bermacam-macam bentuknya dan besarnya berbeda-beda di antara institusi pemerintah.

Dia mencontohkan, jangan sampai seperti yang selama ini terjadi saat tunjangan kinerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih tinggi dibanding institusi lainnya, termasuk tunjangan di Pemda DKI Jakarta yang lebih tinggi dibanding daerah lain. ■ KAL